KONTRIBUSI PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) TERHADAP KEBANGKITAN PERS SERTA PENGARUH KEBEBASAN PERS TERHADAP PWI DI KOTA BANJARMASIN 1998 - 2007

Muhammad Lintang Ardiatno[1], Salma Sa`diah[2], Suci Arianti[3],
Wuritia Rifcoh Nakhesa S[4], Zulhijati Zahra[5]
Universitas Lambung Mangkurat
2310111210005@mhs.ulm.ac.id; 2310111220021@mhs.ulm.ac.id;
2310111120003@mhs.ulm.ac.id; 2310111220003@mhs.ulm.ac.id;
zahra.kdg11@gmail.com

Abstract

The press acts as a liaison between the public and the government through mass media. In a democratic society, freedom of expression and the right to information must be guaranteed, as both are fundamental human rights. However, the implementation of press freedom in the reform era still faces various challenges. Compared to the New Order era, which was highly personal, powerful, and politically dominant, the post-New Order era brought significant changes to the press in Indonesia, including in Banjarmasin. This study aims to explore the contribution of the Indonesian Journalists Association (PWI) and the influence of press freedom on PWI, which serves as a national unifying organization for journalists, providing significant benefits in the post-1998 press revival and the influence of press freedom on PWI's performance in Banjarmasin. This study uses a library research method with a historiographic approach to analyze various written sources regarding the contribution of the Indonesian Journalists Association (PWI) to the revival of the press and the influence of press freedom on PWI in Banjarmasin from 1998 to 2007. The research results show that the Indonesian Journalists Association (PWI) contributed to the revival of the press in Banjarmasin City after the 1998 Reformation. PWI helped improve the quality of journalists and supported press freedom. Press freedom also enabled PWI to achieve better results in press development in Banjarmasin City between 1998 and 2007.

Keywords: Indonesian Journalists Assocition, Revival of the pers, pers freedom

Abstrak

Pers berperan sebagai penghubung informasi antara masyarakat dan pemerintah melalui media massa. Dalam kehidupan yang demokratis, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat serta hak untuk memperoleh informasi harus dijamin, karena keduanya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang fundamental. Namun, pelaksanaan kebebasan pers pada era reformasi masih menghadapi berbagai tantangan. Jika dibandingkan dengan masa Orde Baru yang bersifat sangat personal, kuat, dan dominatif dalam politik, era pasca-Orde Baru membawa perubahan signifikan bagi dunia pers di Indonesia, termasuk di kota Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan mengulik kontribusi PWI serta pengaruh kebebasan pers terhadap PWI

yang menjadi wadah organisasi pemersatu wartawan secara nasional yang mampu memberikan manfaat besar dalam kebangkitan pers pasca 1998 serta pengaruh kebebsan pers terhadap kinerja PWI di kota banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan historiografi untuk menganalisis berbagai sumber tertulis mengenai kontribusi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terhadap kebangkitan pers serta pengaruh kebebasan pers terhadap PWI di Kota Banjarmasin pada tahun 1998-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PWI berkontribusi dalam mendukung kebangkitan pers di Kota Banjarmasin setelah Reformasi 1998. PWI membantu meningkatkan kualitas wartawan dan mendukung kebebasan pers. Adanya kebebasan pers juga membuat PWI dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dalam perkembangan pers di Kota Banjarmasin pada tahun 1998-2007.

Kata kunci: Persatuan Wartawan Indonesia, Kebangkitan pers, Kebebasan pers.

A. Pendahuluan

Pers merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi karena berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, kontrol sosial, serta media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam sistem demokrasi, kebebasan pers menjadi indikator penting bagi terbukanya ruang publik yang sehat dan partisipatif. Namun, pada masa Orde Baru, kebebasan pers di Indonesia mengalami berbagai pembatasan melalui kontrol pemerintah terhadap media massa, pembredelan, hingga pembatasan izin penerbitan pers. Kondisi tersebut menyebabkan ruang gerak wartawan dan media menjadi terbatas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat (Putra, 2025).

Perubahan besar terjadi setelah reformasi 1998 yang ditandai dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan lahirnya era keterbukaan demokrasi di Indonesia. reformasi membawa dampak signifikan terhadap perkembangan pers nasional, terutama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memberikan jaminan terhadap kebebasan pers. Kebebasan tersebut membuka peluang bagi media massa untuk berkembang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pers tidak lagi berada di bawah tekanan politik yang ketat sebagaimana terjadi pada masa sebelumnya, sehingga media dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara lebih bebas (Palupi *et al*., 2023).

Setelah berakhirnya kekuasaan Orde Baru, terjadi berbagai perubahan

politik yang cukup besar baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk di Kota Banjarmasin. Hal ini ditandai dengan perubahan sistem demokrasi, lahirnya berbagai regulasi baru, serta pembaruan kebijakan hukum termasuk di bidang pers. Pada masa reformasi, pers Indonesia mulai memperoleh kebebasan setelah kurang lebih dua puluh delapan tahun berada di bawah tekanan dan pengawasan ketat pada era Orde Baru. Sebelumnya, pers harus mengikuti sistem politik pemerintah dan setiap perusahaan pers diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Penerangan No. 01/Pers/Menpen/1984 yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan, sehingga pemerintah memiliki kontrol yang kuat terhadap kebebasan pers. Kondisi ini menunjukkan adanya pembatasan ruang gerak pers meskipun secara hukum melalui Undang-Undang Pokok Pers Nomor 11 Tahun 1966 telah dijamin adanya kebebasan pers, namun dalam praktiknya lebih dominan aturan teknis dari pemerintah yang membatasi kebebasan tersebut (Arnus, 2015).

Sebagai organisasi tertua di Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memiliki kontribusi besar dalam menjaga eksistensi dan perkembangan pers di berbagai daerah, termasuk di Kota Banjarmasin. Pada periode 1998-2007, PWI turut berperan dalam mendorong kebebasan pers sekaligus menjaga agar kebebasan tersebut tetap berjalan sesuai kode etik jurnalistik. Selain itu, PWI juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya wartawan melalui berbagai kegiatan organisasi sehingga mampu menghadapi tantangan pers di era reformasi yang semakin terbuka dan kompetitif pengakuan pemerintah terhadap PWI sebagai satu-satunya organisasi kewartawanan pada tahun 1975 menjadikan PWI memiliki peran yang sangat penting sebagai wadah pemersatu wartawan di tingkat nasional. Karena menjadi organisasi kewartawanan yang diakui secara resmi oleh pemerintah, PWI memiliki kewenangan dalam menentukan siapa saja yang dapat terlibat dalam dunia pers atau industri media pada saat itu (Aditya *et al*., 2022). Melalui hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui dan mengulik lebih lanjut mengenai dampak apa yang terjadi

atas peran PWI yang menjadi wadah organisasi pemersatu wartawan secara nasional yang mampu memberikan manfaat besar dalam kebangkitan pers pasca 1998 di kota banjarmasin.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan *(library research)*, yaitu penelitian yang menggunakan sumber tertulis sebagai bahan kajian seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, dan dokumen lainya. (Sari *et al*., 2023). Penelitian jenis ini berfokus pada penelusuran dan analisis berbagai literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap topik yang di teliti. Metode penelitian sejarah kepustakaan sejarah dokumen historis yang berkaitan dengan kontribusi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terhadap kebangkitan pers di Kota Banjarmasin pada tahun 1998-2007. Dengan menggunakan penelitian sejarah historiografi, bertujuan untuk menghasilkan penulisan sejarah yang objektif, kritis, dan terperinci dengan mempertimbangkan berbagai sumber dan perspektif yang ada. Sehingga kontribusi PWI terhadap kebangkitan pers di kota Banjarmasin mampu mendukung dalam mendorong perkembangan kehidupan demokrasi melalui kebangkitan pers pasca reformasi 1998 di Kota Banjarmasin.

C. Hasil dan Pembahasan

Kondisi Singkat Pers Sebelum Era Reformasi Tahun 1998 di Kota Banjarmasin

Perkembangan pers di Kota Banjarmasin sebelum reformasi 1998 memiliki sejarah yang panjang dan mengalami berbagai perubahan sesuai dengan kondisi politik yang berlangsung di Indonesia. Pers tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi, tetapi juga menjadi sarana perjuangan, propaganda, hingga alat kontrol pemerintah pada berbagai periode sejarah. Dinamika tersebut dapat dilihat sejak masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, Orde Lama, hingga Orde Baru.

Pada masa kolonial Belanda, perkembangan pers di Banjarmasin dimulai dengan terbitnya surat kabar Sinar Borneo pada tahun 1906. Surat kabar ini menjadi salah satu media pertama yang hadir di Kalimantan Selatan meskipun hanya bertahan

selama satu tahun. Setelah itu muncul berbagai surat kabar lain seperti Pengharapan (1907), *Borneo Advertentie Blad* (1913), dan *Brita Bahalap* (1914). Kehadiran surat kabar tersebut menunjukkan bahwa Banjarmasin telah berkembang sebagai pusat aktivitas pers di Kalimantan Selatan. Selain menjadi media informasi dan perdagangan, pers pada masa ini juga mulai menumbuhkan kesadaran politik masyarakat. Salah satu contohnya adalah terbitnya Soeara Kalimantan pada tahun 1930 yang turut memperkenalkan kembali istilah "Kalimantan" sebagai identitas daerah dan memperkuat semangat kebangsaan masyarakat setempat. Meskipun sebagian besar surat kabar pada masa kolonial masih berada di bawah pengaruh pemerintah Belanda dan kelompok elite tertentu, keberadaannya memberikan fondasi penting bagi perkembangan dunia jurnalistik di Banjarmasin. Pers mulai menjadi ruang penyebaran gagasan, pertukaran informasi, serta sarana pembentukan kesadaran sosial dan politik masyarakat.

Memasuki masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945, perkembangan pers mengalami perubahan yang sangat signifikan. Seluruh media massa berada di bawah pengawasan ketat pemerintah militer Jepang. Salah satu surat kabar yang terbit pada masa ini adalah Kalimantan Raya yang dipimpin oleh A.A. Hamidhan. Pemerintah Jepang tetap menganggap penggunaan nama tersebut dapat membangkitkan semangat nasionalisme rakyat sehingga kemudian diubah menjadi Borneo Shinboen dan berada di bawah kendali langsung pemerintah Jepang. Pada periode ini, kebebasan pers hampir tidak ada karena seluruh isi pemberitaan harus mendukung kepentingan pemerintah pendudukan. Pers dijadikan alat propaganda untuk menyebarkan kebijakan Jepang dan membentuk opini masyarakat sesuai dengan kepentingan militer. Pengalaman wartawan dan pengelola media pada masa Jepang menjadi modal penting bagi perkembangan pers setelah Indonesia merdeka.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, pers di Banjarmasin memasuki fase baru yang ditandai dengan semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada masa Orde Lama

(1945-1965), pers tidak hanya berfungsi sebagai media informasi tetapi juga menjadi alat perjuangan politik. Dalam situasi ketika Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia melalui pemerintahan NICA, berbagai surat kabar digunakan untuk menyuarakan semangat nasionalisme dan perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Pada masa ini muncul surat kabar seperti Indonesia Merdeka dan Kalimantan Berdjoeang yang menjadi media perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Melalui pemberitaan dan tulisan-tulisan yang diterbitkan, surat kabar tersebut berperan dalam membangun kesadaran nasional dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung perjuangan kemerdekaan. Pers menjadi salah satu instrumen penting dalam membentuk opini publik serta memperkuat identitas nasional masyarakat Banjar. Peran pers sebagai media perjuangan pada masa Orde Lama menunjukkan bahwa wartawan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai bagian dari gerakan sosial dan politik yang memperjuangkan kepentingan bangsa. Pengalaman tersebut kemudian membentuk karakter pers daerah yang memiliki kedekatan dengan aspirasi masyarakat.

Pada masa Orde Baru (1965-1998), perkembangan pers di Banjarmasin berlangsung dalam situasi yang berbeda. Pemerintah menerapkan kontrol yang ketat terhadap media massa melalui berbagai kebijakan, termasuk kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Pers diarahkan untuk mendukung stabilitas nasional dan program pembangunan pemerintah melalui konsep Pers Pancasila dan Pers Pembangunan. Walaupun berada dalam pengawasan negara, dunia pers di Banjarmasin tetap mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berbagai media massa bermunculan, seperti Media Masyarakat, Publika, Dinamika Berita, dan beberapa surat kabar lainnya. Salah satu media yang berhasil berkembang adalah Dinamika Berita yang kemudian berubah menjadi Kalimantan Post. Kehadiran media-media tersebut menunjukkan bahwa aktivitas jurnalistik tetap berjalan meskipun ruang kebebasan pers sangat terbatas (Mohammad, 2022). Dengan adanya kebijakan pemerintah

yang represif menyebabkan pers tidak dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara maksimal. Ancaman pencabutan izin terbit membuat banyak media memilih berhati-hati dalam memberitakan kebijakan pemerintah. Akibatnya, kritik terhadap pemerintah jarang muncul secara terbuka. Meskipun demikian, pengalaman menghadapi berbagai bentuk pembatasan tersebut justru melahirkan kesadaran di kalangan wartawan mengenai pentingnya kebebasan pers dan independensi media (Hadini, 2026).

Kontribusi PWI terhadap Kebangkitan Pers di Kota Banjarmasin 1998-2007

Pasca reformasi 1998, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banjarmasin memiliki kontribusi penting dalam mendukung kebangkitan pers di Kota Banjarmasin. Perubahan politik yang terjadi setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru membawa perubahan besar terhadap kehidupan pers Indonesia. PWI berupaya menyesuaikan diri dengan iklim demokrasi yang berkembang dan mengambil peran sebagai organisasi profesi yang mendukung kemerdekaan pers sekaligus menjaga agar kebebasan tersebut tetap berjalan secara bertanggung jawab. PWI banjarmasin juga berkontribusi untuk mendukung kebangkitan kebebasan pers pasca-reformasi. Setelah tahun 1998, PWI tidak lagi diposisikan sebagai organisasi yang berfungsi mengontrol wartawan atas nama pemerintah sebagaimana yang sering dikaitkan dengan masa Orde Baru. Sebaliknya, PWI berupaya mendukung terciptanya kehidupan pers yang lebih demokratis dengan tetap memperhatikan tanggung jawab sosial pers. Dukungan tersebut turut mendorong berkembangnya media massa lokal yang memperoleh ruang lebih luas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya PWI juga mampu menjadi pendukung profesionalisme jurnalistik.

Pada masa kepemimpinan Rusdi Effendi AR, PWI menekankan keberhasilan pers dalam memberitakan Pilkada memerlukan keterlibatan aktif berbagai pihak, seperti tokoh politik, partai politik, KPU, Panwas, dan masyarakat. Seluruh elemen tersebut diharapkan berperan dalam mengawasi serta mengevaluasi pemberitaan media agar informasi

yang disampaikan kepada publik tetap akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pelaksanaan kampanye di media cetak sebaiknya didukung oleh tenaga profesional di bidang komunikasi untuk merancang strategi komunikasi yang efektif. Hubungan yang baik antara pelaku politik dan media massa, khususnya wartawan serta redaktur, juga penting karena mereka memiliki pengaruh dalam pembentukan opini publik. Dalam konteks ini, kebebasan pers dipahami sebagai perwujudan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, bukan sebagai hak istimewa yang hanya dimiliki oleh media atau jurnalis (Aditya *et al*., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberitaan Pilkada tidak hanya menjadi tanggung jawab pers, tetapi juga memerlukan peran aktif berbagai pihak dalam mengawasi informasi yang disebarluaskan. Selain itu, profesionalisme dalam komunikasi politik dan hubungan yang baik dengan media dapat mendukung penyampaian informasi yang efektif. Dengan demikian, kebebasan pers dimaknai sebagai upaya untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat, objektif, dan dapat dipercaya.

PWI Banjarmasin terlihat dalam pengawasan terhadap pemberitaan politik dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pada awal era otonomi daerah, PWI mengingatkan media agar tidak berpihak kepada kandidat tertentu dan tetap menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional. Organisasi ini menegaskan bahwa media harus berperan sebagai penyampai informasi yang objektif, akurat, dan berimbang sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dalam menentukan pilihan politiknya dan juga mendorong kontrol publik terhadap media. PWI menyarankan agar tokoh politik, partai politik, penyelenggara pemilu, serta masyarakat ikut mengawasi dan mengkritisi pemberitaan media massa. Tujuannya adalah menjaga kuamas informasi yang disampaikan kepada masyarakat agar tetap tepat, akurat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak, media diharapkan mampu menjalankan fungsi sosialnya secara lebih bertanggung jawab.

PWI Banjarmasin juga menjaga perkembangan pers daerah di Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Pada masa reformasi muncul berbagai media baru seperti Serambi Ummah (1999), Bebas 1999), Metro Banjar (1999), dan Radar Banjar (2001). Kemunculan media-media tersebut menunjukkan berkembangnya kebebasan pers di daerah. Dalam kondisi tersebut, PWI berperan mengawal perkembangan pers agar kebebasan yang diperoleh pasca-reformasi tidak disalahgunakan dan tetap berjalan sesuai dengan etika jurnalistik. Dengan demikian, perkembangan media lokal dapat berlangsung secara sehat dan profesional.

Pengaruh Kebebasan Pers Terhadap Kinerja PWI di Kota Banjarmasin

Kebebasan pers merupakan salah satu hasil penting dari reformasi tahun 1998 yang membawa perubahan besar bagi dunia jurnalistik di Indonesia, termasuk di Kota Banjarmasin. Sebelum reformasi, kegiatan pers masih berada di bawah pengawasan ketat pemerintah sehingga media massa tidak sepenuhnya bebas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kebebasan pers semakin terjamin dan wartawan memperoleh hak yang lebih luas dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Perubahan ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Kota Banjarmasin sebagai organisasi profesi yang menaungi para wartawan. Salah satu pengaruh utama kebebasan pers terhadap PWI di Kota Banjarmasin adalah semakin terbukanya ruang bagi wartawan untuk menjalankan profesinya secara bebas dan profesional. Dengan tidak adanya lagi penyensoran, pembredelan, maupun larangan penerbitan media oleh pemerintah, wartawan dapat mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa tekanan seperti yang terjadi pada masa sebelumnya. Kondisi ini membuat anggota PWI memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menjalankan fungsi jurnalistik secara optimal dalam memberikan informasi yang akurat dan aktual kepada masyarakat. Kebebasan pers juga

meningkatkan peran PWI dalam membina dan mengembangkan kualitas sumber daya wartawan. Pada era reformasi, perkembangan media massa di Kota Banjarmasin semakin pesat sehingga kebutuhan akan wartawan yang profesional juga semakin meningkat. Dalam situasi tersebut, PWI memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi anggotanya melalui pelatihan, pembinaan, dan pemahaman mengenai kode etik jurnalistik. Dengan adanya kebebasan pers, PWI tidak hanya berfungsi sebagai organisasi profesi, tetapi juga sebagai lembaga yang menjaga kualitas pemberitaan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Selain itu, kebebasan pers memberikan pengaruh terhadap meningkatnya fungsi pers sebagai kontrol sosial. Wartawan yang tergabung dalam PWI dapat lebih leluasa melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pers menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan kritik, masukan, dan informasi kepada publik secara terbuka. Melalui pemberitaan yang dilakukan oleh media massa, masyarakat dapat mengetahui berbagai perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi di Kota Banjarmasin. Dengan demikian, keberadaan PWI menjadi semakin penting karena berperan dalam memastikan bahwa fungsi kontrol sosial tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan etika jurnalistik. (Hadini, 2026).

Pengaruh di bidang politik, kebebasan pers memberikan kesempatan kepada wartawan untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan pemerintah, pelaksanaan pemilu, serta berbagai isu politik lainnya secara lebih terbuka. Masyarakat memperoleh akses informasi yang lebih luas sehingga dapat berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi dengan lebih baik. Dalam hal ini, PWI berperan menjaga independensi wartawan agar pemberitaan yang disampaikan tetap objektif dan tidak memihak kepentingan tertentu, sementara di bidang ekonomi, kebebasan pers mendorong berkembangnya industri media massa yang membuka peluang kerja bagi wartawan dan tenaga media lainnya. Bertambahnya jumlah media cetak, radio, televisi, dan media daring di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa

kebebasan pers turut memberikan dampak terhadap pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi. PWI menjadi salah satu organisasi yang membantu wartawan menghadapi perubahan tersebut dengan meningkatkan kemampuan profesional anggotanya agar mampu bersaing di tengah perkembangan dunia media. Pengaruh bidang sosial, kebebasan pers memungkinkan wartawan untuk lebih aktif menyampaikan berbagai informasi mengenai kehidupan masyarakat, pendidikan, kebudayaan daerah, serta berbagai permasalahan sosial yang terjadi di Kota Banjarmasin. Informasi tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu yang berkembang di lingkungan mereka. Melalui pemberitaan yang dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab, pers turut berperan dalam membangun kehidupan sosial yang lebih terbuka dan demokratis (Aulia & Nasution, 2025)

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan media massa di Kota Banjarmasin telah melewati berbagai perubahan sejarah yang cukup panjang, mulai dari masa kolonial hingga zaman Orde Baru yang penuh dengan pembatasan, sanksi pembredelan, dan kewajiban memiliki SIUPP. Momentum reformasi 1998 membawa lahir UU Nomor 40 Tahun 1999, yang menjadi perubahan penting dan memberikan perlindungan serta kebebasan bagi media massa nasional dan daerah. Di ruang yang terbuka ini, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Banjarmasin berubah dari alat kontrol pemerintah dulu menjadi fasilitator yang independen, yang membantu perkembangan media lokal. PWI secara aktif berperan dalam meningkatkan profesionalisme jurnalistik, terutama melalui pengawasan terhadap pemberitaan politik yang seimbang dalam pemilihan kepala daerah, serta memastikan bahwa semangat kebebasan pers setelah reformasi tetap berada dalam batas-batas kode etik jurnalistik.

Di sisi lain, kebebasan pers yang dijamin setelah tahun 1998 memiliki pengaruh besar terhadap dinamika internal dan kinerja anggota PWI di Kota Banjarmasin. Tidak adanya tekanan politik dan penyensoran tidak hanya memberi ruang lebih luas bagi

jurnalis untuk menjalankan tugas kontrol sosial secara maksimal, tetapi juga mendorong pertumbuhan cepat industri media cetak serta elektronik di daerah. Fenomena ini membuat PWI semakin bertanggung jawab untuk menjadi lembaga yang terus meningkatkan kemampuan dan kualitas para wartawan melalui berbagai jenis pelatihan. Akhirnya, kerja sama antara kebebasan pers dan peran aktif PWI berhasil memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat Banjarmasin, terutama dalam hal transparansi informasi politik, pertumbuhan sektor komunikasi ekonomi, serta memperkuat lingkungan demokrasi yang lebih sehat.

Referensi

Aditya, P., Syaharuddin, S., Rochgiyanti, R., Mardiani, F., & Prawitasari, M. (2022). Jejak kebangkitan pers kota Banjarmasin pasca 1998. *Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial*, 2(1).

Arnus, S. H. (2015). Jejak Perkembangan Sistem Pers Indonesia. *Jurnal Al-Munzir*, 8(1), 103-113.

Aulia, W., & Nasution, N. H. (2025). Kebebasan Pers dan Keselamatan Jurnalis di Sumatera Selatan pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi,* 10(2), 286-298.

Fariz, M. (2022). *Kebebasan Pers Terhadap Masyarakat Di Kota Banjarmasin Tahun 1998-2009*. (Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat)

Hadini, Z. I. (2026). *Bentuk-bentuk perlawanan jurnalis Tempo terhadap pembredelan pada era Orde Baru (1994-1998)*. (Skripsi, Universitas Lampung).

Mohammad, F. (2022). *Kebebasan Pers Terhadap Masyarakat di Kota Banjarmasin Tahun 1998-2009*. (Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat)

Palupi, R., Irhamdhika, G., & Medianti, U. S. (2023). Karakteristik Komunikasi Media Massa Pada Era Reformasi. *J-IKA: Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas BSI Bandung*, 10(1), 1-9.

Putra, N. M. (2025). Kebebasan Pers dalam Transisi Demokrasi: Studi

Kasus Indonesia Pasca-Reformasi. *Publisistik: Riset Jurnalistik dan Media Komunikasi*, 2(1), 15-19.

Sari, M. N., Susmita, N., & Ikhlas, A. (2025). *Melakukan penelitian kepustakaan*. Pradina Pustaka.